**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui Formulasi Kebijakan Bandung Creative Hub Di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bandung Creative Hub sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam menunjang kegiatan ekonomi kreatif dalam pelaksanaannya belum efektif selama ini.
2. Belum adanya Peraturan dalam bentuk Peraturan Walikota/Daerah, baru ada Peraturan Dinas berbentun SOP.
3. Dalam Formulasi Kebijakan Bandung Creative Hub Di Kota Bandung baru dalam proses penelaahan dan pembahasan secara mendalam di dalam Pemerintah Kota Bandung.
4. Dalam proses analisis permlasahan mengenai Bandung Creative Hub belum melibatkan banyak pelaku dalam menganalisis permasalahan mengenai ekonomi kreatif yang nantinya akan menjadi Peraturan yang memayungi Bandung Creative Hub ini.
5. Adanya ketidak sesuaian pendapat dari pihak pengelola Bandung Creative Hub (Pemerintah) dengan para pelaku ekonomi kreatif, dimana belum adanya sosialisasi yang jelas mengenai gedung Bandung Creative Hub.
6. Pemerintah Kota Bandung dalam tahap analisis permasalahan ini jangan terlalu terburu-buru dalam menentukan kebijakan. Analisis secara matang dan juga melibatkan lagi lebih banyak para pelaku untuk memperkaya referensi dalam proses perumusan kebijakan ini. Agar dapat menghasilkan kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Walikota/Daerah dalam memayungi Bandung Creative Hub yang efektif dan tepat sasaran.

**5.2. Saran**

1. Harus adanya Peraturan Walikota/Daerah untuk memayungi Bandung Creative Hub agar bisa berjalan dengan baik dan efektif, dan juga meminimalisir penyalahgunaan atau penyelewengan kedepannya.
2. Karena dalam formulasi kebijakan Bandung Creative Hub baru sampai di analisis permalasahan, maka harus teliti lebih dalam lagi dalam perumusan ini dan melibatkan lebih banyak pelaku dalam menganalisis permasalahan ini agar dapat menyentuh seluruh stakeholder pelaku ekonomi kreatif dan nantinya dalam hasil formulasi kebijakan menghasilkan Peraturan yang efektif.
3. Pemerintah Kota Bandung dalam analisis permasalahan ini sebaiknya menentukan dengan tepat apakah gedung Bandung Creative Hub ini sebaiknya menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau di kelola oleh pihak ke tiga yaitu swasta agar bisa berjalan dengan efektif dan maksimal.
4. Pihak pengelola Bandung Creative Hub dan juga Pemerintah Kota Bandung sebaiknya lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan Bandung Creative Hub dan juga mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi agar para pelaku dan juga warga kota Bandung menjadi lebih tahu mengenai kegiatan-kegiatan dan juga fasilitas apa saja yang ada di Bandung Creative Hub.
5. Mengajak kolaborasi melalui program yang diadakan oleh Bandung Creative Hub kepada para pelaku ekonomi kreatif, seperti mengadakan seminar, workshop, pameran, acara musi, dsb. Agar memberikan dampak yang lebih besar lagi dan bermanfaat bagi para pelaku ekonomi kreatif dan juga masyarakat Kota Bandung.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik.* Bandung : CV Pustaka Setia

Harbani, Pasolong. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV. Alfabeta

Irawan, Beddy. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik: Dari Klasik Ke Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia

Purwanto, Erwan dan Sulistyastuti, Dyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Grava Media

Siagian, Sondang. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sina Baru Algensindo

Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Malang : CAPS (Center for Academic Publishing Service)

1. **Dokumen**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025

Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tentang Penetapan Peraturan Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Gedung Bandung Creative Hub Tahun 2018

1. **Media Elektronik**

<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/12/28/bandung-creative-hub-resmi-beroperasi-apa-saja-fasilitasnya-416821> (diakses: 140219; 16:00)

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/09/seputar-pengertian-kreativitas.html> (diakses: 140219; 16:25)

<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/104/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-bandung-2016-.html> (diakses: 160219; 20:15)

<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/01/15/ada-pungli-di-bandung-creative-hub> (diakses: 160219; 20:30)

<https://ekbis.sindonews.com/read/1256655/34/hipka-bandung-creative-hub-jadi-inspirasi-industri-kreatif-nasional-1510465201> (diakses: 160219; 20:35)

<https://news.detik.com/jawabarat/4387382/aroma-pungli-dan-pemberhentian-pekerja-di-gedung-kreatif-bandung?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=detik_bandung&utm_campaign=cmssocmed> (diakses: 170219; 19:00)

<http://www.bekraf.go.id/profil/tugas> (diakses: 170219; 19:30)

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp9dc6894103full.pdf> (diakses: 020319; 21:00)